



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 30-11-2018
	PARAF

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

**KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS
SEMPADAN BANGUNAN DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan maka perlu mengatur penentuan As Jalan sebagai dasar untuk menentukan garis sempadan bangunan dari as jalan.
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Dan Garis Sempadan Bangunan Di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

16. Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sbb:
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Dan Garis Sempadan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 119 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 102 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112A).

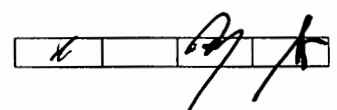
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamandau.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Penyelenggara Jalan adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
9. As Jalan adalah suatu garis yang timbul di tengah-tengah lebar perkerasan jalan atau rencana jalan.
10. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
11. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja yang dibatasi oleh tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Rumaja pada masa yang akan datang.
12. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
13. Jalan bebas hambatan (freeway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.
14. Jalan raya (highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah.
15. Jalan sedang (road) adalah jalan umum dengan lalu lintas sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter.
16. Jalan kecil (street) adalah jalan umum melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.
17. Persil adalah batas hak pemilikan/penguasaan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.
18. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
19. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
20. Saluran pembuang adalah suatu saluran buatan/alam bertanggung atau tidak bertanggung yang fungsinya untuk pengaturan satu daerah tertentu.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
22. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan.

24. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman jalan atau rencana lebar jalan.
25. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan.
26. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan batas pagar sebagai pengaman pagar.
27. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
28. Jalan arteri primer adalah menghubungkan serta berdaya guna antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan kolektor primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, antarpusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

BAB II KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Bagian Kesatu Ketentuan Garis Sempadan Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan wajib mentaati ketentuan garis sempadan.
- (2) Ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai landasan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (3) Tujuan ketentuan garis sempadan adalah untuk tertibnya bangunan dan lingkungan perkotaan.
- (4) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. garis sempadan jalan;
 - b. garis sempadan pagar; dan
 - c. garis sempadan bangunan.

Bagian Kedua Garis Sempadan Jalan Pasal 3

- (1) Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan fungsi perhubungannya dalam suatu jaringan jalan.
- (2) Berdasarkan fungsi perhubungan jaringan jalan dikelompokkan ke dalam:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer; dan
 - d. jalan lingkungan primer.

Pasal 4

- (1) Garis sempadan terhadap jalan ditetapkan dari as jalan ke sebelah kiri dan kanan jalan



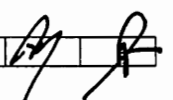
- (2) Garis sempadan jalan dihitung dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu setengah) Rumija (ruang milik jalan)
 - a. jalan arteri primer, 15 (lima belas) meter dari as jalan;
 - b. jalan kolektor primer, 12,5 (dua belas setengah) meter dari as jalan;
 - c. jalan lokal primer, 7,5 (tujuh setengah) meter dari as jalan; dan
 - d. jalan lingkungan primer, 5,5 (lima setengah) meter dari as jalan.
- (3) Rumija paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (4) Bagian dan ukuran Sempadan Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Pagar
Pasal 5

- (1) Garis sempadan pagar berlaku pada lahan-lahan yang memiliki perbedaan ketinggian antara permukaan jalan dan persil tidak sebidang.
- (2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. apabila permukiman persil lebih tinggi dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada permukaan bidang miring sebesar 60% yang ditarik dari batas ruang milik jalan dengan persil; dan
 - b. apabila permukiman persil lebih rendah dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada batas ruang milik jalan dengan persil.
- (3) Garis Sempadan Pagar untuk permukaan jalan dan persil sebidang menurut fungsi jalan adalah:
 - a. jalan arteri primer, 15 (lima belas) meter dari as jalan;
 - b. jalan kolektor primer, 12,5 (dua belas setengah) meter dari as jalan;
 - c. jalan lokal primer, 5 (lima) meter dari garis sempadan pagar; dan
 - d. jalan lingkungan primer, 4 (empat) meter dari garis sempadan pagar.
- (4) Bagian dan ukuran Sempadan Pagar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Bangunan
Pasal 6

- (1) Setiap mendirikan suatu bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer: $\frac{1}{2}$ (satu setengah) rumija ditambah 10 (sepuluh) meter.
 - b. jalan kolektor primer: $\frac{1}{2}$ (satu setengah) rumija ditambah 7,5 (tujuh setengah) meter.
 - c. jalan lokal primer: $\frac{1}{2}$ (satu setengah) rumija ditambah 5 (lima) meter.
 - d. jalan lingkungan primer: $\frac{1}{2}$ (satu setengah) rumija ditambah 4 (empat) meter; dan
 - e. kawasan untuk bangunan bertingkat batas garis sempadan diundur 2,5 (dua setengah) meter untuk setiap penambahan tingkat bangunan dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh) ke atas.
- (2) Jarak Garis Sempadan Bangunan dari As Jalan.
 - a. jalan arteri primer: 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan;
 - b. jalan kolektor primer: 20 (dua puluh) meter dari as jalan;
 - c. jalan lokal primer: 12,5 (dua belas setengah) meter dari as jalan; dan
 - d. jalan lingkungan primer: 9,5 (sembilan setengah) meter dari as jalan.

/ 

- (3) Bagian dan ukuran Sempadan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan ditetapkan sebagai berikut:
- permukiman persil tidak sebidang dengan permukaan jalan apabila terdapat perbedaan ketinggian lebih dari 1½ (satu setengah) meter; dan
 - ketentuan garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan adalah sama dengan garis sempadan bangunan pada permukaan yang sebidang dengan permukaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Jarak Garis Sempadan Bangunan menurut fungsi jalan adalah:
- jalan arteri primer: 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan pagar;
 - jalan kolektor primer: 7,5 (tujuh setengah) meter dari garis sempadan pagar; dan
 - jalan lokal primer: 4 (empat) meter dari garis sempadan pagar.

BAB III

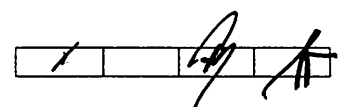
DAERAH SEMPADAN JALAN DAN DAERAH SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Daerah Sempadan Jalan Pasal 8

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi dan/atau lembaga/badan untuk penempatan:
- perkerasan jalan;
 - trotoar;
 - pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - jalur hijau;
 - jalur pemisah;
 - rambu-rambu lalu lintas;
 - jaringan utilitas;
 - sarana umum;
 - parkir; dan
 - saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Penempatan pemanfaatan daerah sempadan jalan harus sejjin Bupati melalui SOPD terkait.

Bagian Kedua Daerah Sempadan Bangunan Pasal 9

Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.



BAB IV
PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas PUPR dan SOPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk kepentingan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perijinan.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.
- (4) Untuk pengendalian yang dilakukan melalui pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penentuan As Jalan ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas PUPR selaku penyelenggara jalan.
- (2) Penentuan As Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 12

Untuk pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait pelaksanaan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal November 2018

BUPATI LAMANDAU,




HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-11-2018
	PARAF 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 41 TAHUN 2018
TANGGAL 30 NOVEMBER 2018

TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

BAGIAN JALAN DAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

No		Panjang	Lebar Bagian Jalan (Meter)			Garis Sempadan (Meter)			(GSB dari As Jalan) (Meter)
			RUMIJA	RUMAJA	RUWASJA	Garis Sempadan Jalan (GSJ)	Garis Sempadan Pagar (GSP)	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jln. Tjilik Riwut	4.100	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
2	Jln. Batu Batanggui	3.890	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
3	Jln. Jenderal Achmad Yani	3.075	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
4	Jln. J. C. Rangkap	0.250	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
5	Jln. Meleti	1.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
6	Jln. Saudagar Achmad	2.300	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
7	Jln. Pupu Hermansyah	0.520	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
8	Jln. Niaga	1.250	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
9	Jln. Niaga I	0.150	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
10	Jln. Niaga II	0.150	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
11	Jln. Niaga III	0.100	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
12	Jln. Niaga IV	0.100	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
13	Jln. Raden Kertawana	0.800	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
14	Jln. Raden Kertawana I	0.250	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
15	Jln. Raden Kertawana II	0.100	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
16	Jln. Raden Kertawana III	0.100	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
17	Jln. Raden Kertawana IV	0.100	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
18	Jln. Raden Kertawana V	0.100	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
19	Jln. Kertawana VI	0.488	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
20	Jln. Gst. M. Yusuf, B. A.	0.500	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
21	Jln. Bukit Hibul Utara	0.900	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
22	Jln. Bukit Baka	0.475	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
23	Jln. Bukit Raya	0.950	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
24	Jln. Bukit Hibul Timur	2.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
25	Jln. Bukit Hibul Selatan	0.650	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
26	Jln. Pangeran Antasari	2.784	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
27	Jln. Letnan Jenderal Suprpto	2.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
28	Jln. Djagui Mamud	2.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
29	Jln. Kubau	0.600	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
30	Jln. Ir. H. Pangeran M. Noor	0.300	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
31	Jln. Bukit Hibul Barat	1.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
32	Jln. Simpang Guci	2.275	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
33	Jln. Bundaran E - Alun-alun	1.550	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
34	Jln. Alun-alun	1.200	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
35	Jln. Alun-alun - Bumi Agung	1.700	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
36	Jln. Bumi Agung - Arga Mulya	3.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0

No		Panjang	Lebar Bagian Jalan (Meter)			Garis Sempadan (Meter)			(GSB dari As Jalan) (Meter)
			RUMIJA	RUMAJA	RUWASJA	Garis Sempadan Jalan (GSJ)	Garis Sempadan Pagar (GSP)	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37	Jln. Arga Mulya - Bukit Indah	3.050	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
38	Jln. Sumber Mulya	5.700	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
39	Jln. Bukit Indah	3.400	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
40	Jln. Ulin	0.400	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
41	Jln. Melati I	0.200	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
42	Jln. Melati II	0.410	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
43	Jln. Melati III	0.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
44	Jln. Melati IV	0.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
45	Jln. Anggrek	0.400	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
46	Jln. Kenanga	0.550	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
47	Jln. Seroja	0.350	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
48	Jln. Teratai	0.400	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
49	Jln. Bungur	0.480	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
50	Jln. Kemboja	0.350	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
51	Jln. Mawar	0.480	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
52	Jln. W. R. Supratman	1.774	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
53	Jln. Raden Ajeng Kartini	0.480	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
54	Jln. Fatmawati	1.150	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
55	Jln. Pondulungan	0.960	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
56	Jln. Maskaya Pengaruh	1.750	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
57	Jln. Adyaksa	1.850	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
58	Jln. Letjen S. Parman	2.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
59	Jln. Gaharu	1.185	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
60	Jln. Nanga Bulik - Bunut	7.990	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
61	Jln. Bunut - Sei Mentawa	8.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
62	Jln. Desa Batu Kotam	2.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
63	Jln. Sepaku - Perigi	15.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
64	Jln. Perigi - Beruta	11.597	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
65	Jln. Menuju Mess Desa	1.330	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
66	Jln. Perumda - Alun-alun	2.750	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
67	Jln. Simpang Sepaku - Nanga Bulik Seberang	6.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
68	Jln. Pompaan	1.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
69	Jln. Simpang Batu Kotam - SMP	6.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
70	Jln. Simpang Guci - Ajang	6.900	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
71	Jln. Bukit Sawa - Bundaran E	6.800	60	20	7.5	30.0	30.0	7.5	37.5
72	Jln. Nasional Km. 14 - Bukit Sawa	3.200	40	20	7.5	20.0	20.0	7.5	27.5
73	Jln. Nasional Km. 9 - Jalan 60	1.370	40	20	7.5	20.0	20.0	7.5	27.5
74	Jln. Nasional Km. 11 - Jalan 60	1.725	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
75	Jln. Nasional Km. 7 - Bakrie	0.740	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
76	Jln. Panglima Batur	1.190	25	20	5.0	12.5	12.5	5.0	17.5
77	Jln. Kujan - Batu Kotam	12.000	25	20	5.0	12.5	12.5	5.0	17.5
78	Jln. Batu Kotam - Guci	3.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
79	Jln. Nasional Km. 2 - Bakrie	1.250	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
80	Jln. Letnan Jenderal Suprpto - Bakrie	4.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0

No		Panjang	Lebar Bagian Jalan (Meter)			Garis Sempadan (Meter)			(GSB dari As Jalan) (Meter)
			RUMIJA	RUMAJA	RUWASJA	Garis Sempadan Jalan (GSJ)	Garis Sempadan Pagar (GSP)	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81	Jln. Alun-alun - Bunut	6.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
82	Jln. Sungai Mentawa - Beruta	3.400	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
83	Jln. Sepaku Perigi Km. 8,5 - PLTBG POME	1.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
84	Jln. Jangkar Prima	3.350	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
85	Jln. Wonorejo - Mekar Mulya	9.775	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
86	Jln. Tri Tunggal	5.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
87	Jln. Bina Bhakti	3.200	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
88	Jln. Melata	8.561	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
89	Jln. Perigi - Melata	9.760	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
90	Jln. Melata - Mukti Manunggal	4.984	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
91	Jln. Bukit Raya	4.656	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
92	Jln. Sumber Jaya	4.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
93	Jln. Bukit Harum	5.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
94	Jln. Bukit Makmur	4.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
95	Jln. Mukti Manunggal	6.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
96	Jln. Modang Mas	3.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
97	Jln. Batu Ampar	2.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
98	Jln. Topalan - Batu Ampar	12.300	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
99	Jln. Nanuah	2.500	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
100	Jln. Lubuk Hiju	6.900	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
101	Jln. Nanga Palikodan	3.000	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
102	Jln. Bukit Jaya	2.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
103	Jln. Pedongatan	6.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
104	Jln. Suka Maju	1.240	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
105	Jln. Geligir	7.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
106	Jln. Nanga Koring	4.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
107	Jln. Merambang	5.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
108	Jln. Batu Tunggal	8.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
109	Jln. Sungkup	6.200	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
110	Jln. Toka	2.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
111	Jln. Sepondam	4.700	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
112	Jln. Beruta - Pedongatan	19.237	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
113	Jln. Beruta - Bayat	31.059	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
114	Jln. Beruta Bayat Km.9,6 - Nanga Belantikan	2.754	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
115	Jln. Beruta Bayat Km.9,8 - Sumber Cahaya - Bukit Jaya	8.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
116	Jln. Beruta Bayat Km.28,7 - Tangga Batu	3.200	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
117	Jln. Beruta Bayat Km.30,2 - Belibi	9.600	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
118	Jln. Beruta Bayat Km. 32,5 - Loda Manyam	3.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
119	Jln. Beruta Bayat Km. 32,5 - Bayat	5.450	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
120	Jln. Sp. HPH - Kahingai	3.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
121	Jln. Sp. HPH - Nanga Matu	3.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
122	Jln. Sp. HPH - Benuatan	8.000	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
123	Jln. Nasional - Sekombulan	3.200	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
124	Jln. Sekombulan - Kubung	0.500	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5

No		Panjang	Lebar Bagian Jalan (Meter)			Garis Sempadan (Meter)			(GSB dari As Jalan) (Meter)
			RUMIJA	RUMAJA	RUWASJA	Garis Sempadan Jalan (GSJ)	Garis Sempadan Pagar (GSP)	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
125	Jln. Penyombaan	2.300	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
126	Jln. Lopus - Mengkalang	9.000	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
127	Jln. Kubung - SMP	3.400	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
128	Jln. Kudangan	1.700	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
129	Jln. Beruta Bayat - Fuyusan	11.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
130	Jln. Fuyusan	9.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
131	Jln. Panopa	20.500	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
132	Jln. Simp HPH	2.250	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
133	Jln. Kuburan	0.700	11	8	5.0	5.5	5.5	5.0	10.5
134	Jln. Samujaya - Sekoban	5.356	15	12	5.0	7.5	7.5	5.0	12.5
135	Jln. Sei Tuat	6.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
136	Jln. Nasional Sepoyu - Benakitan	8.394	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
137	Jln. Benakitan - Ginih	3.300	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
138	Jln. Ginih - Kinipan	4.350	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
139	Jln. Benakitan	3.525	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
140	Jln. Liku - Mengkalang	3.900	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
141	Jln. Mengkalang	10.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
142	Jln. Karang Mas	9.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0
143	Jln. Mengkalang	6.000	25	20	7.5	12.5	12.5	7.5	20.0

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

